EVALUASI RENJA

TRIBULAN I TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

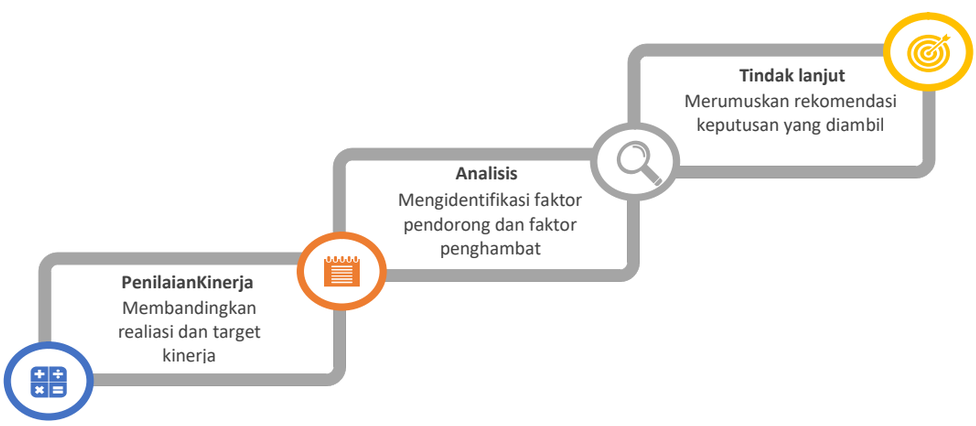
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskantindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta

keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikanlatar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2023, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gapanalysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

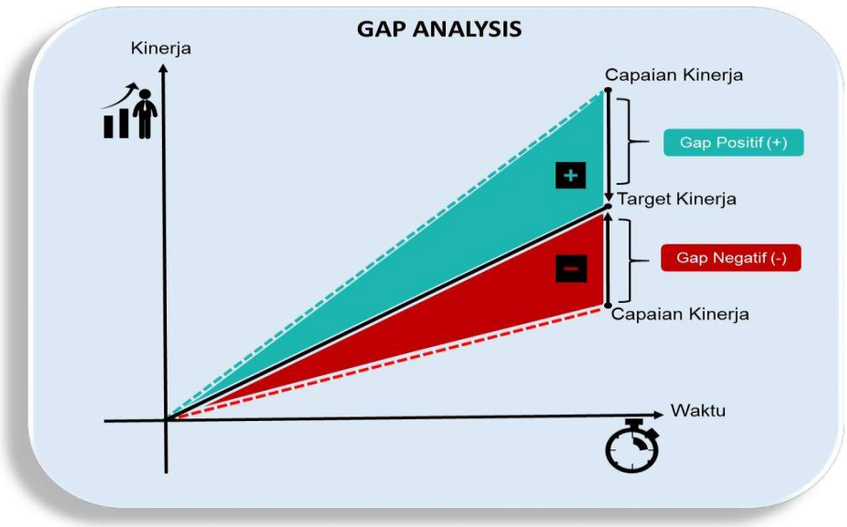
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥91%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *GapAnalysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target

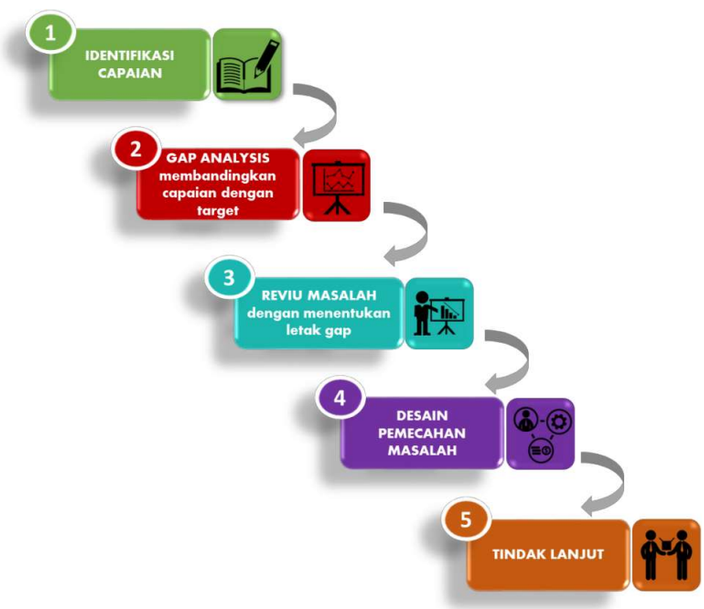
kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk :

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gapanalysis* :

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif.
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *uptodate*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2023

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2023 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase peningkatan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	83,90	0	0
2	**Sasaran :** Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	58,50	0	0
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,21	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100	100	100

Pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinciIndikator kinerja tujuan/sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator tujuan persentase peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman terealisasi sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,90% dengan tingkat capaian sebesar 0%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu penjumlahan dari persentase 3 (tiga) indikator sasaran kemudian dibagi 3 (tiga) dikali dengan 100%.
2. Realisasi indikator sasaran persentase pengurangan luasan kawasan kumuh terealisasi sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 58,50% dengan tingkat capaian sebesar 0%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah luasan kawasan kumuh yang ditangani di kabupaten (Ha) dibagi dengan jumlah luasan total kawasan kumuh yang ditetapkan di kabupaten (Ha) dikali dengan 100%.

3. Realisasi indikator sasaran persentase ketersediaan rumah layak huni terealisasi sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,21% dengan tingkat capaian sebesar 0%.

   Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) dibagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit) di kali dengan 100%.
4. Realisasi indikator sasaran persentase penyelesaian permasalahan pertanahan dalam Kabupaten terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

   Dengan rumus perhitungan yang di dapat yaitu jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan ke Dinas PRKPP dalam 1 tahun di kali dengan 100%.

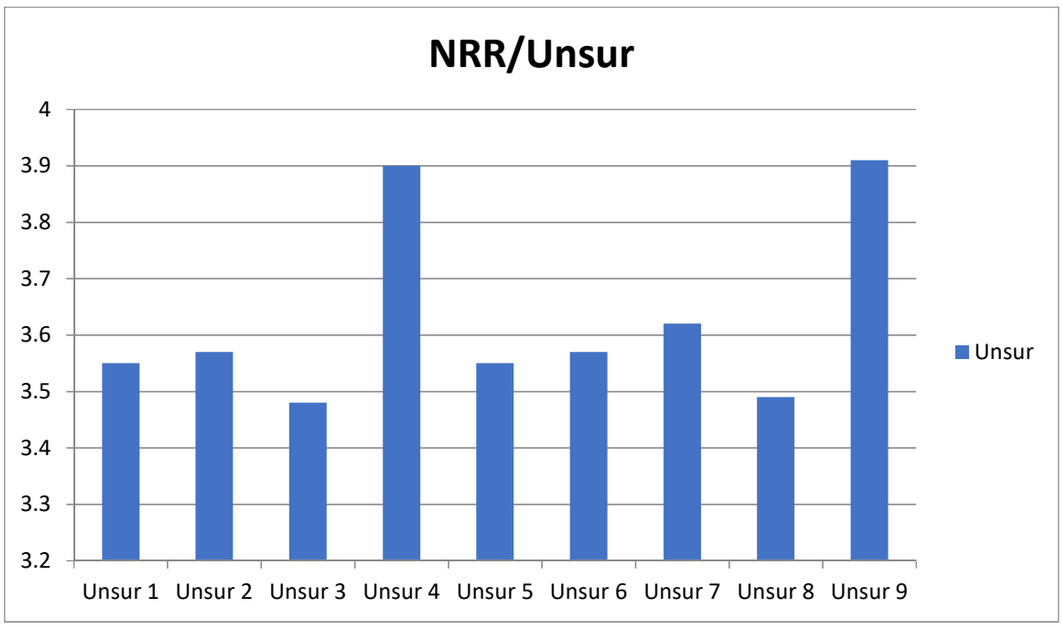
II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	88,46%	98,28%

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)” yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 90% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 88,46% dengan kategori A (Sangat Baik) dan dari 139 responden, maka diperoleh persentase capaian sebesar 98,28%.

Perkembangan Capaian Kinerja Per Semester

No	Indikator Kinerja	Semester I	Semester II
1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,46%	-



U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Perilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari ke 9 Unsur SKM diatas, posisi kinerja pelayanan terendah ada pada layanan U3 (Waktu Penyelesaian) kemudian pada U5 (Produk Spesifikasi Jenis Layanan) dan U8 (Sarana dan Prasarana). Dari analisis tersebut maka diperlukan rencana tindaklanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Waktu Penyelesaian pengurusan suatu jenis pelayanan pada Dinas PRKPP dilaksanakan secara cepat, mudah (tidak berbelit) dan hasilnya sesuai harapan pemohon layanan.
2. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah dari Pemerintah, sehingga indikator kinerja jumlah penerima bantuan meningkat.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan prasarana dan sarana layanan.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sebanyak 9 dokumen antara lain :

1. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
2. Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
3. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023
5. Dokumen RKA Tahun 2024
6. Dokumen RKA-Perubahan Tahun 2023
7. Dokumen DPA Tahun 2023
8. Dokumen DPA-Perubahan Tahun 2023
9. Dokumen LKjIP Tahun 2022

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun yaitu sebanyak 6 dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dilaksanakan sebanyak 7 Sub Bagian antara lain Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sebanyak 5 Jenis antara lain Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan keluaran Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan dipelihara sebanyak 20 unit Pengadaan Mebel 4 Unit dan 16 unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan keluaran jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun sebanyak 12 laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan keluaran jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebanyak 9 unit Kendaraan Dinas Operasional 4 Unit, Peralatan dan mesin 4 unit dan 1 unit gedung bangunan kantor.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengurangan backlog rumah	95%	0%	0%

Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase pengurangan backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	97%	0%	0%

Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 97% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perbaikan Rumah Dan Kawasan Permukiman Kumuh	95%	0%	0%

Dalam Pelaksanaan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja Persentase Perbaikan Rumah Dan Kawasan Permukiman

Kumuh yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	100%	0%	0%

Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Ditingkatkan	100%	0%	0%

Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Ditingkatkan yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 0%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 0%.

Realisasi Keuangan pada Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman masih tergolong sangat rendah dengan capaian 0%. Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤50% ada pada kegiatan berikut :

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil sebesar 0% hal ini dikarenakan subkegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebab kewenangan penerbitan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman ada di pusat (Kementerian PUPR).

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Sengketa Tanah Garapan Yang Terselesaikan	100%	100%	100%

Dalam Pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator kinerja Presentase Sengketa Tanah Garapan Yang Terselesaikan yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 100% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 100%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam (1) Satu Daerah Kabupaten/Kota berupa 1 dokumen berita acara Penyelesaian Sanggahan oleh warga terdampak Tol Kertosono – Kediri.

Realisasi Keuangan pada Program Penatagunaan Tanah masih tergolong sangat rendah dengan capaian 63,12%. Penyebab Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤ 80% diantaranya :

1. Penyerapan anggaran rapat-rapat koodinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka mediasi penyelesaian masalah pertanahan disesuaikan dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
8	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah	95%	95%	100%

Dalam Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan Penggunaan Tanah yang ditargetkan pada Tahun 2023, sebesar 95% pada Tribulan I telah terealisasi sebesar 95%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota berupa 2 dokumen Laporan Hasil Cruising Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan PPKH dan Laporan Akhir Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

Realisasi Keuangan pada Program Penatagunaan Tanah masih tergolong sangat rendah dengan capaian 75,08%. Penyebab Proporsi penyerapan anggaran terendah ≤80% diantaranya :

- Penyerapan anggaran jasa konsultansi tata batas lahan pengganti di Kabupaten Bondowoso tidak bisa dilakukan, karena SK Penunjukkan Lahan Pengganti dari Menteri KLHK belum terbit.
- Besaran pembayaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) akibat penebangan pohon di lahan relokasi penduduk dampak pembangunan bendungan semantok berkurang, dikarenakan dilakukan perhitungan ulang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	**Tujuan :** Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman	Permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait	Terbentuknya forum dan pokja PKP sehingga diharapkan bisa menjembatani untuk membawa isu-isu bidang perumahan dan permukiman kepada para pengambil kebijakan
2	**Sasaran :** Meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Terbatasnya alokasi anggaran dan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni	Adanya instansi/unit kerja yang dibentuk untuk menangani masalah perumahan dan permukiman yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
	Meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan	Banyaknya aset-aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan ditelantarkan	

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Percepatan penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan	Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran seperti usulan DPRD dan lain-lain
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Penyusunan laporan menunggu hasil laporan realisasi fisik dari masing-masing pengampu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengurangi pagu anggaran pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Perpres 33 Tahun 2019 maka perjalanan dinas dalam daerah kurang memenuhi target waktu yaitu 8 jam
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Mutasi Jabatan	Masih adanya pos jabatan yang belum terisi secara definitif
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN yang membidangi

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Penyusunan laporan menunggu hasil validasi BPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Memberikan Motivasi Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan	
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Tersedianya anggaran untuk diklat dan memotivasi kepada Pegawai Negeri Sipil	Kurangnya antusias dari Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik yang harus disediakan	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Mebel	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan kendaraan tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan kendaraan tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan peralatan dan mesin tidak bisa diprediksi sebelumnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kerusakan peralatan dan mesin tidak bisa diprediksi sebelumnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Proses pengurusan rekomendasi siteplan, PBG, SLF dan kejadian bencana tidak dapat diprediksi
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	Mendorong progres pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana di lahan relokasi	Kurangnya kecepatan masyarakat terdampak bencana dalam memenuhi persyaratan administrasi
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana AtaunRelokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran	Proses serahterima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terhambat karena pemenuhan persyaratan administrasi yang belum lengkap
	Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran	Proses serahterima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terhambat karena pemenuhan persyaratan administrasi yang belum lengkap

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kegiatan bersifat incidental atau tergantung pada terjadinya bencana alam dan kebakaran sehingga tidak dapat diperkirakan
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	-Kurangnya penyedia jasa konsultan yang sesuai dalam proses pemilihan penyedia jasa sehingga terjadi keterlambatan -Kegiatan bersifat incidental atau tergantung pada pemohon pelayanan sehingga tidak dapat diperkirakan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kegiatan bersifat incidental atau tergantung pada pemohon pelayanan sehingga tidak dapat diperkirakan
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	kegiatan bersifat incidental atau tergantung pada pemohon pelayanan sehingga tidak dapat diperkirakan
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	Melakukan studi tiru/banding di Pemerintah Kota/Kabupaten terdekat serta menghadiri rapat koordinasi di Pusat untuk alternatif mekanisme penanganan kawasan kumuh yang lain	Fokus Pokja PKP di tahun 2023 adalah reviuw dokumen keciptakaryaan dan persampahan (PUPR dan DLH) sehingga belum menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi penanganan terkait kawasan permukiman kumuh
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dapat dilakukan rekruitmen ulang terhadap tenaga pendamping sebelumnya yang berkinerja baik setelah dilakukan evaluasi kinerjanya	Terlambatnya proses rekruitmen tenaga pendamping perbaikan RTLH di dalam kawasan kumuh, sehingga verifikasi ulang terhadap penerima bantuan belum bisa dilakukan, dan berkas pencairan bansos tidak bisa segera dipenuhi
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan		Masih berlangsungnya proses verifikasi penerima bantuan dan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		perlunya koordinasi dengan pengampu wilayah di kawasan kumuh, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa belum bisa berkontrak dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Terlambatnya proses rekruitmen tenaga pendamping perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, sehingga verifikasi ulang terhadap penerima bantuan belum bisa dilakukan, dan berkas pencairan bansos tidak bisa segera dipenuhi
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kurangnya penyedia jasa konsultan yang sesuai dalam proses pemilihan penyedia jasa sehingga terjadi keterlambatan
	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kurangnya penyedia jasa konsultan yang sesuai dalam proses pemilihan penyedia jasa sehingga terjadi keterlambatan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kurangnya penyedia jasa konsultan yang sesuai dalam proses pemilihan penyedia jasa sehingga terjadi keterlambatan
	Verifikasi Dan Penyerahan PSU Permukiman Dari Pengembang	Kegiatan/Subkegiatan bersifat rutin dan berulang sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman tahun lalu	Kurangnya penyedia jasa konsultan yang sesuai dalam proses pemilihan penyedia jasa sehingga terjadi keterlambatan
6	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil		
7	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Masih berlangsungnya proses pengadaan tanah Tol Kertosono - Kediri, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan
8	**Program Penatagunaan Tanah**		
	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Agar masyarakat yang menempati tanah relokasi Bendungan Semantok dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka TMKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum jelasnya besaran pokok PSDH dan DPEH terkait TMKH Lahan Semantok, dan belum terbitnya SK Pelepasan/Penunjukkan sehingga kewajiban Bupati sebagai Pemohon Ijin belum bisa dilaksanakan dan tata batas belum bisa dilakukan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Agar masyarakat yang menempati tanah dalam kawasan hutan dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka PPTPKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum jelasnya beban penganggaran terkait PPTPKH dan mekanisme pelaksanaan tata batasnya, sehingga anggaran belum bisa direalisasikan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dang fungsi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu antisipasi sejak dini untuk upaya-upaya perbaikan dan penyesuaian melalui evaluasi secara berkala setiap bulannya secara intens dan konsisten serta berkoordinasi antar bagian dan sekretaris Dinas PRKPP dan Pimpinan Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Akhirnya melalui laporan evaluasi Rencana Kerja Tribulan I Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tribulan selanjutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

1. Ketertarikan Pegawai terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dapat ditingkatkan dengan cara memberikan penghargaan yang dapat digunakan untuk menunjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjadikan salah satu syarat untuk menduduki suatu jabatan yang ada di instansi.
2. Melakukan koordinasi dengan Pokja UKPBJ.
3. Melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak perangkat desa.
4. Melakukan pendampingan kepada pengembang dalam pembuatan siteplan perumahan yang sesuai dengan ketentuan teknis.
5. Melakukan pendampingan kepada pemohon dalam memenuhi dokumen teknis PBG dan SLF.
6. Mengupayakan penambahan anggaran di Perubahan APBD untuk pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi penanganan kumuh yang harus segera ditangani
7. Pendataan dalam identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan lebih ditingkatkan lagi

8. Menganggarkan kembali di Perubahan APBD untuk lokasi-lokasi penanganan kumuh yang harus segera ditangani
9. Menganggarkan kembali di Perubahan APBD bagi calon penerima bantuan yang lain sesuai kriteria untuk optimalisasi anggaran
10. Penyusunan PERBUP 36 Tahun 2023 tentang Juklak Pelimpahan PSU
11. Mengadakan pendampingan dan sosialisasi kepada pengembang
12. Mempercepat jawaban atas sanggahan warga terdampak dengan selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat
13. Segera melakukan pembayaran pokok PSDH, DPEH, Biaya investasi Perhutani setelah P-APBD TA. 2023 disahkan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
PRKPP

AGUS FRIHANNEDY,S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013